

**ANALISIS PENGAWASAN DAN KESADARAN WAJIB RETRIBUSI
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR
(Studi Kasus Pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Muhamad Andri
NIM : 22 2011 127**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

**ANALISIS PENGAWASAN DAN KESADARAN WAJIB RETRIBUSI
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR
(Studi Kasus Pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Muhamad Andri
NIM : 22 2011 127**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Andri

Nim : 22 2011 127

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 27 OKTOBER 2015
Yang membuat pernyataan,



Muhamad Andri

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengawasan dan Kesadaran Wajib Retribusi
Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi
Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota
Palembang)

Nama : Muhamad Andri
Nim : 22 2011 127
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan
Pada tanggal,**

Pembimbing



(Aprianto, S.E., M.Si)

NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Percaya lah dengan kebaikan yang ALLAH tetapkan dan tak akan tertukar dengan orang lain.*

(Muhamad Andri)

Ku persembahkan kepada :

- *Papa dan Mama tercinta untuk semua tetes keringat do'a restu dari kalian*
- *Kakak (Ari Latief Pratama, S.H, M.Kn) dan Adik tersayang (Hijir Permata Indah)*
- *Angelia Mutiara untuk motivasi dan do'a nya*
- *Untuk pembimbingku Bpk, Aprianto, S.E, M.Si*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater tercinta*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengawasan dan Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)**”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku (Ir. Kifrawi dan Karla Susanti) dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Aprianto, S.E, M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan ibu Welly, S.E., M.Si., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta Staf dan karyawan-karyawati Dinas PD Pasar 10 Ulu Kota Palembang.
7. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materiil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 Desember 2015

Penulis



Muhamad Andri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Pendapat Asli Daerah.....	12

2. Retribusi Daerah.....	16
3. Retribusi Pasar	22
4. Pengawasan.....	27
5. Kesadaran Wajib Retribusi	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel.....	31
D. Data Yang Diperlukan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah Singkat.....	35
2. Visi dan Misi	36
3. Struktur Organsiasi dan Pembagian Tugas	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Analisis Pengawasan Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang).....	58

2. Analisis Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang).....	60
---	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 10 Ulu Palembang Tahun 2010-2014.....	5
Tabel I.2	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi WC pada 10 Ulu Palembang Tahun 2010-2014.....	5
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	11
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Penerimaan Sewa Petak Pasar 10 Ulu.....	53
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Penerimaan Penghasilan Harian/Kontribusi Pasar 10 Ulu	53
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Penerimaan WC Pasar 10 Ulu	54
Tabel IV.4	Target dan Realisasi Penerimaan Penatausahaan Pasar 10 Ulu.....	54
Tabel IV.5	Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Pasar 10 Ulu.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organsiasi PD. Pasar Palembang Jaya	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 : Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 4 : Fotokopi Sertifikat Membaca dan MenghapaI Al-Qur'an
- Lampiran 5 : Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran 6 : Fotokopi Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhamad Andri/222011127/2015/Analisis Pengawasan dan Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)/Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui pengawasan dan kesadaran wajib retribusi serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya anggaran penerimaan retribusi disebabkan rendahnya pengawasan penerimaan retribusi pasar di Pasar 10 Ulu Kota Palembang tidak rutin menyetorkan pungutan retribusi harian dan bulan kepada PD. Pasar Palembang Jaya. Petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi kurang melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal ini disebabkan masih kurangnya pengawasan di beberapa sektor penerimaan retribusi. Setiap kegiatan pemungutan sudah dikoordinasikan dengan cukup baik. Namun pada penerimaan dari sektor WC masih kurangnya koordinasi kegiatan terhadap fasilitas WC seperti penyediaan air bersih, atau kebersihan fasilitas WC masih sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pada sektor tersebut sehingga mempengaruhi terhadap penerimaan retribusi pasar. Pemborosan dan penyelewengan sudah dicegah dengan pembagian tugas dengan setiap masing-masing fungsi. Disini penyelewengan yang masih mungkin terjadi terdapat pada retribusi parkir. Kebersihan pasar dan pengawasan terhadap barang dari setiap pedagang sudah dijalankan dengan cukup baik. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Kata kunci : Pengawasan, Kesadaran Wajib Retribusi, Penerimaan Retribusi Pasar

ABSTRACT

Muhammad Andri / 222011127/2015 / The Analysis of Supervision, Realization of , Retribution Obligation, and its Impact to The Market Retribution Revenue (Case study at 10 Ulu Market Palembang) / Public Sector Accounting.

The purpose of this research were to know the supervision and realization of retribution obligation and its impact to the market retribution revenue (case study at 10 Ulu Market Palembang).

This research was descriptive research. The data used in this research were primer and secondary data. Techniques of collecting the data of this research were interview and documentation.

The result of this research showed not there were no accomplishment of calculation retribution revenue which caused by the low supervision market retribution in 10 Ulu Market Palembang. It also caused that the supervision daily and monthly retribution payment to the PD. Jaya Market Palembang. The functionaries in implementation of retribution collection were not maximal, it was caused by the low supervision in several retribution revenue sector. The retribution collection has been coordinated well however the low coordination of toilet sector revenue was low which were clean water readiness. The lack of toilet facility sanitation which influenced the market retribution revenue. The deviation had been prevented by distributing the dolies to this function. The deviation which could be happen in parked retribution. The sanitation of market and the supervision to the commodity from each seller has been implemented well and the developing the believe from society to the leadership organization.

Keywords: Monitoring, Awareness Compulsory levies, levies Market Acceptance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era yang semakin maju sekarang ini, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah perlu ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, masih harus diakui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masih terbatas, sehingga prinsip otonomi yang nyata dan pertanggungjawaban masih harus ditunjang dengan dikonsentrasikan yaitu administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat, dan kebijakan lain dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Upaya meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya yaitu dengan meningkatkan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah sendiri. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendukung eksistensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah daerah sendiri dan dipungut oleh daerah sendiri. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah dana yang dapat bersumber dari:

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN) atau dari masyarakat.
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Jasa Pengelolaan Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat di dalam wilayah pasar. Tempat berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar. Petugas PD. Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku. Objek Jasa pengelolaan adalah tempat berjualan dan segala fasilitas dan utilitas yang ada di wilayah pasar. Subjek jasa pengelolaan adalah setiap orang atau badan

yang mempergunakan fasilitas dan utilitas pasar. Sesuai dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (1) huruf f, yang menjadi objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar perlu adanya pengawasan dan dipengaruhi kesadaran wajib retribusi. pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, sistem yang berlaku.

Pasar 10 Ulu Palembang merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Palembang dengan jumlah pedagang sebanyak 200 pedagang. Penarikan retribusi pasar dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disingkat PD Pasar Pasar Palembang Jaya milik pemerintah kota Palembang. Fenomena yang terjadi saat ini di Pasar 10 Ulu Palembang yaitu masih belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan PAD Kota Palembang. Menurut data dari Dinas Pasar

Kota Palembang target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada pasar 10 Ulu Palembang selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 10 Ulu Palembang
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2010	391.782.499,97	367.381.350,00	93,77
2	2011	452.012.200,00	444.785.698,00	98,40
3	2012	589.333.438,00	573.184.175,00	97,26
4	2013	694.956.327,00	597.028.700,00	85,91
5	2014	499.937.625,00	465.868.525,00	93,19

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Apalagi jika kita lihat data tahun 2013 persentase selisih target dan realisasinya sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Hal ini menggambarkan masih terselip masalah dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar 10 Ulu Palembang. Retribusi pasar yang diterima meliputi retribusi sewa petak, penghasilan harian/kontribusi, WC, penatausahaan dan parkir.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi WC pada 10 Ulu Palembang
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	7.200.000	5.450.000
2	2011	7.200.000	
3	2012	7.199.738	
4	2013	7.179.627	2.319.000
5	2014	5.340.000	4.830.000
Total		34.119.365	12.598.000

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Berdasarkan table 1.2 pengawasan yang kurang rutin berdampak menurunnya penerimaan retribusi di pasar, seperti pengawasan terhadap fasilitas WC yang ada di pasar dimana target dalam 5 tahun terakhir sebesar Rp. 34.119.365 hanya terealisasi sebesar Rp. 12.598.000. Hal tersebut disertai kurangnya kesadaran pemakai fasilitas pasar untuk membayar retribusi.

Agar PAD dapat terus ditingkatkan maka optimalisasi pemungutan retribusi pasar sangat penting dilakukan. Hal ini terlihat dari fakta yang mana terlihat masih belum tercapainya target anggaran penerimaan retribusi pasar di Pasar 10 Ulu Palembang. Dengan melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi daerah khususnya retribusi pasar maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengawasan dan Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengawasan dan kesadaran wajib retribusi serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengawasan dan kesadaran wajib retribusi serta

dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam pengawasan dan kesadaran wajib retribusi serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar.

2. Bagi Dinas Pasar 10 Ulu Palembang

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sehingga dapat bermanfaat atau memberikan masukan yang positif bagi Dinas Pasar 10 Ulu Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ristina dan Azhari (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah Aceh”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah.

Kesimpulan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah adalah kesalahan dalam sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah, sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi.

Ardana (2013) meneliti dengan judul Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan laju inflasi terhadap penerimaan retribusi pasar di kota Semarang. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi pasar di Kota Semarang pada tahun 2002-2010.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB perkapita dan laju inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder per-triwulan dari tahun 2002-2010. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable jumlah penduduk dan PDRB perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Kedua variable tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap penerimaan retribusi pasar. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, semakin banyak orang yang berkunjung ke pasar akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar. PDRB perkapita memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar, bila PDRB perkapita tinggi maka kemampuan masyarakat untuk berbelanja akan lebih tinggi karena kebutuhan untuk berbelanja terpenuhi. Laju inflasi memiliki hubungan variable dan tidak signifikan dengan penerimaan retribusi pasar. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable jumlah penduduk, PDRB perkapita dan laju inflasi secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi pasar. Nilai R^2 sebesar 0,950 yang berarti sebesar 95% variasi penerimaan retribusi pasar dapat dijelaskan dari variasi ketiga

variable bebas sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Tilawatil (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh sumber daya manusia, pengelolaan, regulasi, pengawasan, kesadaran wajib retribusi serta sarana dan prasarana terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pengelolaan, regulasi, pengawasan, kesadaran wajib retribusi serta sarana dan prasarana terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas pasar dan 6.750 pedagang pasar yang dikenakan pungutan retribusi pasar kota Padang, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *total sampling* untuk dinas pasar dan *judgment sampling* untuk pedagang pasar sebagai pelengkap penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan dan melakukan wawancara kepada kepala dinas pasar, kepala UPTD pasar dan pedagang untuk bahan pendukung bagi pelengkap pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variabel dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian ini yaitu variable sumber daya manusia, pengelolaan, regulasi memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Sedangkan, variable pengawasan, kesadaran wajib retribusi, serta sarana dan prasarana tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun Judul, Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Ristina, Dewantinieung dan Azhari A Samudera (2012), Analisis Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah Aceh	Faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah adalah kesalahan dalam sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah, sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang retribusi pasar. Perbedaannya yaitu pada unit penelitian.
2	Ardana Indra P (2013), Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang	Variable jumlah penduduk dan PDRB perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Laju inflasi memiliki hubungan variable dan tidak signifikan dengan penerimaan retribusi pasar.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang retribusi pasar. Perbedaannya yaitu pada unit penelitian dan variable yang dibahas.
3	Tilawatil Ciseta (2014), Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang	Variable sumber daya manusia, pengelolaan, regulasi memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Sedangkan, variable pengawasan, kesadaran wajib retribusi, serta sarana dan prasarana tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang retribusi pasar. Perbedaannya yaitu pada unit penelitian.

Sumber : *Peneliti*, 2015

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Abdul (2007: 94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam

membayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
- 4) Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 6) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 14) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- 15) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 16) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 17) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- 18) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 19) Retribusi Terminal;
 - 20) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 21) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 22) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 23) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 24) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 25) Retribusi Penyeberangan di Air;
 - 26) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - 27) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 28) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 29) Retribusi Izin Gangguan;
 - 30) Retribusi Izin Trayek; dan
 - 31) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
- 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.

- n. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- p. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- q. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- r. Retribusi Tempat Pelelangan;
- s. Retribusi Terminal;
- t. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- u. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- v. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- w. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- x. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- y. Retribusi Penyeberangan di Air;
- z. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- aa. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- bb. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- cc. Retribusi Izin Gangguan;
- dd. Retribusi Izin Trayek; dan
- ee. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Marihot (2005: 4), retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, definisi-definisi yang berkaitan dengan retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- e. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- h. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- m. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Marihot (2005: 7), adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Jasa Pengelolaan Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat di dalam wilayah pasar. Tempat berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar. Petugas PD. Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku. Objek Jasa pengelolaan adalah tempat berjualan dan segala fasilitas dan utilitas yang ada di wilayah pasar.

signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas usaha jual beli barang atau jasa di pasar. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir.

Sunarto (2005: 21) retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Bambang (2005: 135), pengertian Retribusi Pasar adalah: "Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar".

Goedhart dalam Caroline (2005), Klasifikasi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

a. Menurut sifat prestasi Negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

b. Menurut cara menentukan jumlah pungutan Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

c. Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian / mingguan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai,

maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain :

- a. wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m,
- b. obyek retribusi adalah pemakainan tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah,
- c. penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,
- d. retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan,
- e. untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi,
- f. perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta di terapkan sistem denda.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturanaturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

G.R. Terry dalam Tilawatil (2014: 6) pengawasan dapat didefinisikan sebagai “Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan tersebut maka jelas bahwa pengawasan tersebut merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud keinginan semula. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b. Menertipkan koordinasi kegiatankegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

5. Kesadaran Wajib Retribusi

Padila dalam Tilawatil (2014: 6) menyatakan bahwa kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan.

Sunarto (2005: 21) retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Mangoesuebroto dalam Tilawatil (2014: 6) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat.
- b. Tingkat pendidikan.
- c. Sistem yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 53-55), jenis penelitian tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komperatif

Penelitian Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabel nya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui pengawasan dan kesadaran wajib retribusi serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pasar 10 Ulu kota Palembang yang beralamat di Jalan KH. Azhari Kelurahan 9 dan 10 Ulu Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengawasan	Suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah. b. Menertipkan koordinasi kegiatan-kegiatan. c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
Kesadaran Wajib Retribusi	Kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan masyarakat. b. Tingkat pendidikan. c. Sistem yang berlaku.
Penerimaan Retribusi Pasar	pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban membayar jasa pengolahan b. Tarif jasa pengolahan c. Pemungutan jasa pengolahan

Sumber: *Penulis*, 2015

D. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147), data yang diperlukan terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui prantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung/melelui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari retribusi pasar pada dinas pasar, sedangkan data sekunder yaitu diperoleh dari artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Iqbal (2009: 17), berdasarkan jenis cara pengumpulannya, teknik yang digunakan dalam pengumpulan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti (populasi). Pengamatan disebut juga penelitian lapangan.

2. Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.

4. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan Tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.

5. Dokumentasi

Adalah catatan tertulis tentang berbagai aktivitas atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan pedagang dan pengurus yang ada di Pasar 10 Ulu Kota Palembang di Dinas Pasar 10 Ulu Kota Palembang dan dokumentasi dilakukan dengan mencatat data penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar 10 Ulu Kota Palembang.

F. Analisis Data

Sugiyono (2009: 13-14), menyatakan ada dua jenis metode analisis yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif digunakan untuk mengetahui pencapaian penerimaan retribusi pasar pada dinas pasar 10 Ulu Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya awalnya merupakan hasil reorganisasi dari Dinas Pasar dikarenakan pengelolaan perpasaran yang selama ini dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Pasar dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan persaingan global yang menuntut pelayanan serba cepat dan transparan, maka seiring dengan perkembangan kota Palembang sebagai kota metropolitan menuntut kualitas pelayanan diberbagai bidang termasuk perpasaran dan persaingan usaha yang kompetitif. Untuk menjawab tantangan tersebut diatas pemerintah Kota Palembang telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan status dan kedudukan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palembang No.6 Tahun 2005.

Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang pada mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadinya transaksi langsung, namun dari waktu ke waktu dan tuntutan konsumen pasar yang terus berubah maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen serta terjadinya

transaksi barang riil di pasar, akan tetapi pasar merupakan satuan usaha yang lengkap dan kompleks dimana kenyamanan kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Pasar Tradisional yang Modern sebagai saran unggulan dalam menggerakkan perekonomian daerah Kota Palembang.

Misi

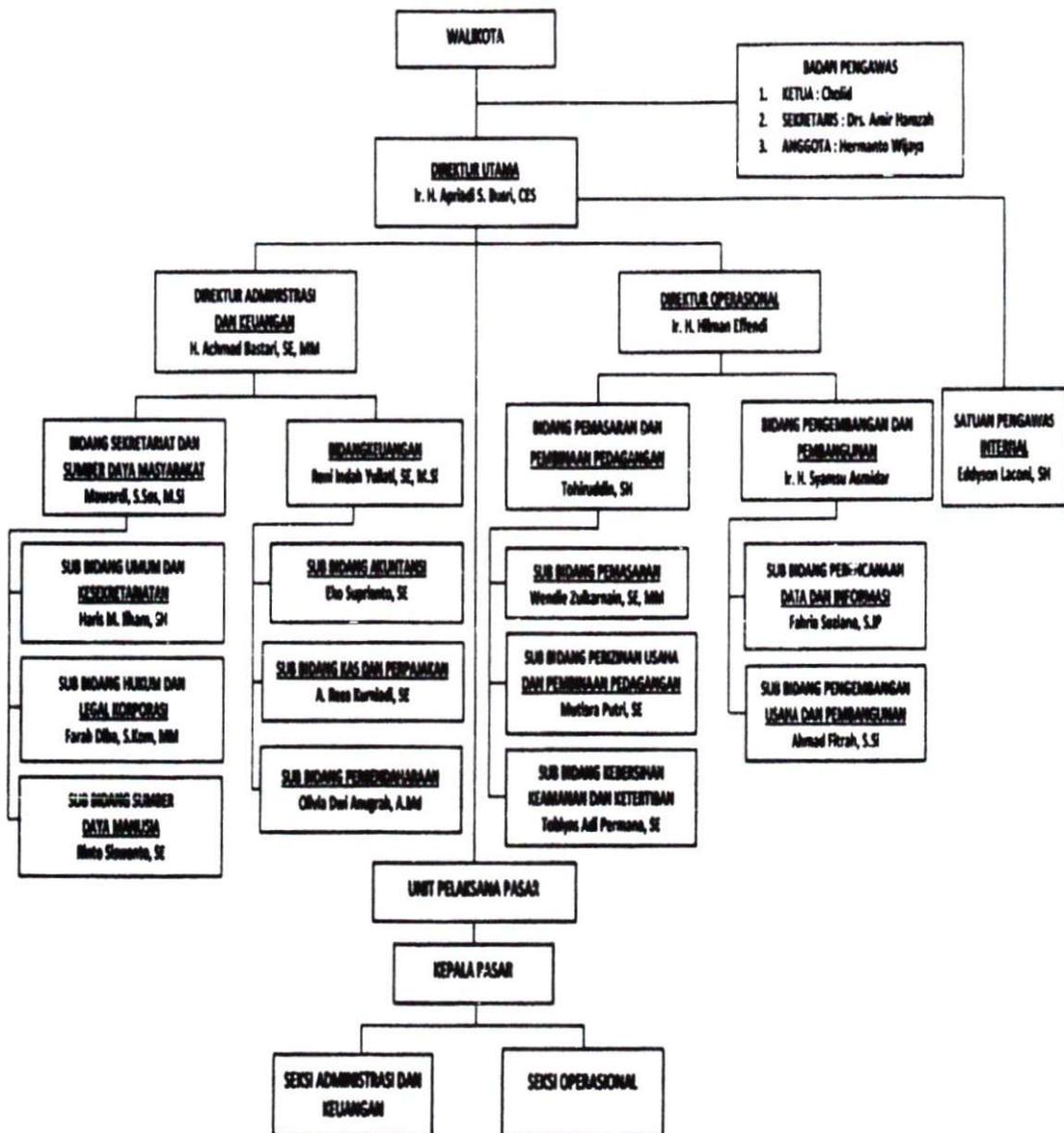
Menyediakan pasar tradisional modern yang bersih, aman, nyaman, sehat dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing.

3. Struktur Organsiasi dan Pembagian Tugas

Struktur organsiasi PD. Pasar Palembang Jaya dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
PD. Pasar Palembang Jaya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA



Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

a. Bidang Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia

Bidang Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan perusahaan.
- 2) Menyelenggarakan inventarisasi dan administrasi asset perusahaan.
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan, pengadaan barang/jasa perusahaan.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan fungsi sosial dan tanggung jawab lingkungan perusahaan.
- 5) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan administrasi hukum dan perundang-undangan serta melaksanakan pembinaan organisasi internal dan ketatalaksanaan perusahaan.
- 7) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan.

b. Sub Bidang Kesekretariatan dan Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Melakukan tugas administrasi surat-surat perusahaan.\

- 2) Mengatur dan mengawasi penggunaan alat-alat tulis kantor serta peralatan kantor.
- 3) Melaksanakan perawatan, pemeliharaan, kebersihan sarana dan prasarana kantor.
- 4) Menyelenggarakan inventarisasi dan mengurus barang-barang inventaris milik perusahaan.
- 5) Mengurus perjalanan dinas, rapat dan acara protokoler lainnya.
- 6) Mengadministrasikan perencanaan kebutuhan dan penggunaan barang perusahaan.
- 7) Mengurus izin serta surat-surat kendaraan milik perusahaan dan mengawasi penggunaannya.
- 8) Menyelenggarakan administrasi barang, tanah, bangunan beserta pensertifikatan dan inventaris lainnya.
- 9) Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberitaan serta berkoordinasi dengan media massa baik media cetak maupun media elektronik.
- 10) Menyelenggarakan penerbitan brosur, leaflet dan pemberitaan lainnya serta berkoordinasi persiapan penyelenggaraan pameran, peresmian pasar dan setiap kegiatan kehumasan.
- 11) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Bidang Kesekretariatan dan SDM.

c. Sub Bidang Hukum dan Legal Korporasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memberikan pendapat hukum berkenaan dengan kebijakan perusahaan.
- 2) Memberikan pendapat hukum dan/atau saran hukum kepada Direksi, Badan Pengawas Pegawai baik yang masih aktif maupun yang purna tugas terkait kepentingan perusahaan.
- 3) Melaksanakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dokumen perjanjian dengan pihak ketiga dan dokumen hukum lainnya.
- 4) Mengurus dan menyimpan sertifikat/surat-surat hak atas tanah milik dan/atau hak pengelolaan perusahaan.
- 5) Melaksanakan koordinasi di dibidang hukum dengan instansi lain yang terkait.
- 6) Menyiapkan bahan kajian, pertimbangan hukum terhadap perjanjian dan produk hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- 7) Menyusun peraturan perusahaan dan menyiapkan pelaksanaan serta penyuluhan / sosialisasi peraturan yang diterbitkan.
- 8) Meneliti peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.
- 9) Mempersiapkan kuasa Direksi tentang penunjukan Konsultan

Hukum/ Pangacara bila diperlukan.

- 10) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Bidang Kesekretariatan dan SDM.
- d. Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan.
 - 2) Merencanakan kebutuhan pegawai, formasi pegawai, dan melaksanakan pembinaan pegawai.
 - 3) Melakukan pengurusan administrasi penerimaan, pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat, kenaikan golongan, kenaikan gaji periodik, mutasi, pemberhentian, pension, hak, kewajiban, dan kesejahteraan serta pendidikan dan latihan pegawai.
 - 4) Mengkoordinasikan penilaian kinerja pegawai.
 - 5) Menyelenggarakan pelantikan dan sumpah pegawai.
 - 6) Melaksanakan kegiatan untuk meregakkan disiplin dan mengurus daftar hadir pegawai.
 - 7) Merencanakan dan menyusun daftar pembayaran gaji dan penghasilan pegawai lainnya.
 - 8) Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan kepegawaian kepada pegawai perusahaan.

- 9) Mensosialisasikan nilai-nilai dan budaya perusahaan serta menyelenggarakan usaha pembinaan mental spiritual sumber daya manusia.
 - 10) Mengumpulkan data bahan anggaran.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Bidang Kesekretariatan dan SDM.
- e. Bidang Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Merencanakan, menetapkan, mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan.
 - 2) Mengendalikan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan Bank, Giro Pos dan lainnya.
 - 3) Menyusun dan melaksanakan sistem informasi keuangan.
 - 4) Menyusun rencana kerja pendapatan dan belanja perusahaan.
 - 5) Menyusun laporan keuangan perusahaan.
 - 6) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan.
- f. Sub Bidang Akutansi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melakukan verifikasi dan membukukan transaksi keuangan sesuai standar akutansi yang berlaku berdasarkan bukti yang sah.
 - 2) Melakukan penyusunan administrasi anggaran, penyelenggaraan akutansi umum dan penerbitan rekening.

- 3) Membuat laporan bulanan realisasi anggaran pendapatan dan beban serta laporan keuangan setiap triwulan dan laporan keuangan tahunan setiap akhir tahun.
 - 4) Melakukan rekonsiliasi Bank secara periodik.
 - 5) Menyusun proyeksi laporan keuangan secara periodik dan melakukan analisa laporan keuangan.
 - 6) Menyimpan bukti transaksi.
 - 7) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Keuangan.
- g. Sub Bidang Kas dan Perpajakan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Menerima, meneliti, menyortir, menyimpan dan menyetorkan uang ke Bank yang telah ditunjuk dengan ketentuan berlaku:
 - 2) Meneliti kebenaran semua tanda bukti penerimaan serta pengeluaran keuangan yang akan dilaksanakan perusahaan;
 - 3) Meneliti kebenaran serta membuat perhitungan administrasi secara periodik untuk mencocokkan buku bank;
 - 4) Mengadakan pengujian terhadap kebenaran daftar gaji, uang intensif, uang lembur dan semua pendapatan pegawai sebelum dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 5) Membuat Surat Tanda Setor Uang (STSU)
 - 6) Melaksanakan koordinasi penagihan piutang hasil kerja sama

- 7) Mengurus dan melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan
 - 8) Menyimpan uang serta dokumen pajak perusahaan dalam brankas
 - 9) Membuat laporan secara periodik sesuai dengan keperluan perusahaan
 - 10) Menyusun laporan posisi Kas/Bank
 - 11) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Keuangan.
Mengadakan pengujian terhadap kebenaran daftar gaji, uang intensif, uang lembur dan semua pendapatan pegawai sebelum dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- h. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melaksanakan pembayaran seluruh pendapatan pegawai termasuk gaji, uang intensif, uang lembur, tunjangan pangan/beras dan tunjangan lainnya
 - 2) Mengumpulkan data untuk bahan anggaran
 - 3) Melaksanakan pembayaran tagihan-tagihan perusahaan kepada pemakai tempat usaha, rekening listrik, rekening air dan tagihan-tagihan lain sesuai ketentuan berlaku
 - 4) Melaksanakan pembayaran berdasarkan bukti yang sah
 - 5) Menyimpan rekening-rekening yang belum tertagih

- 6) Menyelenggarakan dan memelihara buku inkaso/penagihan dan pencatatan tagihen-tagihan lainnya;
 - 7) Menyiapkan kas kecil
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Keuangan.
- i. Bidang Pemasaran dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Merumuskan rencana dan kebijakan pemasaran alat produksi antara lain tempat usaha, parkir, reklame, telekomunikasi, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lahan promosi.
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi tempat usaha antara lain pemasaran dan pemutakhiran data tempat usaha.
 - 3) Membuat rencana promosi perusahaan dan meayusun serta melaksanakan sistem informasi tempat usaha dan pemasaran.
 - 4) Mengkoordinasikan optimalisasi sumber penerimaan antara lain perpenjangan dan penjualan hak pemakaian tempat usaha, penyewaan tempat usaha, administrasi perizinan, jasa perpajakan, jasa MCK. reklame dan sumber penerimaan lainnya.
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, inventarisasi dan penempatan pedagang pada pasar yang akan dibangun/diremajakan dan atau revitalisasi.
 - 6) Mengkoordinasi dan monitoring potensi sumber penerimaan biaya pengelolaan pasar dan sumber penerimaan pasar lainnya

yang dikelola Pelaksana Pasar;

- 7) Melakukan evaluasi terhadap piutang biaya pengelolaan pasar, listrik, listrik bulanan, iuran pembangunan pasar, dan perpanjangan hak pemakaian tempat usaha.
 - 8) Merumuskan rencana dan kebijakan teknis pembinaan pedagang.
 - 9) Menyelenggarakan pembinaan pedagang pasar yang kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan pedagang, sosialisasi, temu usaha serta sebagai fasilitator bagi pedagang.
 - 10) Menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang usaha dan pembinaan pedagang.
 - 11) Mengkoordinasikan penyusunan ketentuan yang berkaitan dengan bidang usaha dan pembinaan pedagang.
 - 12) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Kebersihan, Ketentraman dan ketertiban.
 - 13) Menegakkan Peraturan/Keputusan serta kebijakan Direksi.
 - 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasional.
- j. Sub Bidang Pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Merumuskan rencana dan kebijakan teknis pemasaran.
 - 2) Menyelenggarakan promosi penjualan stand-stand dan pemasaran tempat usaha serta produk-produk perusahaan.
 - 3) Mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi administrasi

pemasaran dan pemutakhiran data tempat usaha.

- 4) Mengkoordinasikan pemakaian tempat usaha.
 - 5) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan sosialisasi dan inventarisasi pedagang pada pasar yang akan dibangun atau revitalisasi.
 - 6) Mengkoordinasikan penempatan pedagang pada tempat penampungan sementara dan bangunan baru hasil peremajaan.
 - 7) Menyusun ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas dan kinerja masing-masing.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Pemasaran dan Pembinaan Pedagang.
- k. Sub Bidang Perizinan Usaha dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Merumuskan rencana dan kebijakan teknis perizinan
 - 2) Membuat dan mengendalikan administrasi perizinan yang berhubungan dengan pemakaian tempat usaha dan perizinan lainnya
 - 3) Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan jasa MCK, jasa parkir, reklame dan antena telekomunikasi;
 - 4) Menyusun ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan perizinan serta berkoordinasi sub bidang hukum dan legal

- 4) Merencanakan ketertiban dalam pengelolaan peruntukan penggunaan tempat usaha.
 - 5) Melaksanakan ketertiban penggunaan tempat usaha dan fasilitas pasar lainnya dilingkungan pasar sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - 6) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan dan ketentuan Direksi.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 8) Melaksanakan pembinaan personil kebersihan, ketentraman dan ketertiban di Unit Pasar.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Pemasaran dan Pembinaan Pedagang.
- m. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan perusahaan.
 - 2) Membuat kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan usaha.
 - 3) Menyusun dan melaksanakan program evaluasi dan monitoring terhadap keseluruhan kegiatan perusahaan.
 - 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan sistem teknologi informasi perusahaan.

- 5) Mengelola dan memutakhirkan informasi mengenai data keuangan dan non keuangan.
 - 6) Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan/ peremajaan pasar dengan Unit Pelaksana Pasar dan Instansi terkait.
 - 7) Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - 8) Melaporkan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan Unit Pasar kepada Direksi.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasional.
- n. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kerja perusahaan.
 - 2) Merencanakan kegiatan evaluasi terhadap sistem dan prosedur kerja.
 - 3) Mengadakan evaluasi pelaksanaan administrasi dan kegiatan operasional perusahaan.
 - 4) Mengkoordinasikan kegiatan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan.
 - 5) Membantu penyusunan rencana dan program perusahaan.

- 6) Menyelenggarakan pengumpulan data yang meliputi segala aktifitas perusahaan.
 - 7) Mengadakan pencatatan dan monitoring harga dan jenis dagangan, di pasar untuk kepentingan perusahaan.
 - 8) Mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan data hasil penelitian dan membuat statistik.
 - 9) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan;
 - 10) Mengendalikan jaringan komputerisasi dan menyusun kebutuhan material komputer dan jaringan.
 - 11) Mengumpulkan data untuk membuat anggaran.
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Perencanaan dan Pembangunan
- o. Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Membuat dan mengajukan usulan proyek pembangunan pasar.
 - 2) Membuat standar operasional prosedur perencanaan pembangunan pasar.
 - 3) Menyusun dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), bestek dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Menyiapkan rencana gambar bangunan pasar dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan.

- 5) Menentukan lokasi tanah yang tepat untuk mendirikan bangunan pasar, termasuk rencana pembebasan tanah/ganti rugi, izin prinsip dan sebagainya.
 - 6) Mengkoordinasikan rencana kerja dan syarat pekerjaan pembangunan pasar dengan konsultan perencana.
 - 7) Menyiapkan perhitungan *Owner Estimate* (OE) dan dokumen terkait dengan konsultan perencana yang perencanaannya dilaksanakan sendiri oleh perusahaan.
 - 8) Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan perusahaan.
 - 9) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan program dengan bidang terkait dan instansi lain.
 - 10) Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan perusahaan.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manager Perencanaan dan Pembangunan.
- p. Unit Pelaksana Pasar mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Perencanaan program kerja Unit Pelaksana Pasar
 - 2) Pelaksanaan kegiatan perpasaran
 - 3) Penagihan dan penyeteroran pungutan
 - 4) Pemeliharaan bangunan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar

- 5) Pengawasan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 6) Ketatausahaan Unit Pelaksana Pasar.
- q. Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
 - 2) Mengurus dan menyelenggarakan inventarisasi
 - 3) Mengurus, menagih, dan menerima pungutan serta menyetorkan hasil pungutan
 - 4) Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pasar.
- r. Seksi Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Mengurus dan menyelenggarakan kebersihan pasar
 - 2) Mengurus pemeliharaan bangunan pasar, sarana dan prasarana pasar
 - 3) Melakukan pencatatan pemakaian listrik dan air pada tempat usaha
 - 4) Mengurus pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar
 - 5) Melaporkan kepada Kepala Pasar dan pihak Kepolisian apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pasar.

B. Pembahasan

Analisis Pengawasan dan Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)

Berikut data penerimaan retribusi pasar pada pasar 10 Ulu Kota Palembang meliputi sewa petak, penghasilahn harian atau kontribusi, penerimaan WC, penatausahaan dan penerimaan parkir :

**Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Sewa Petak
Pasar 10 Ulu**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	130.487.500	130.505.850
2	2011	144.146.700	142.910.640
3	2012	157.253.700	154.988.750
4	2013	157.496.700	156.306.950
5	2014	145.292.625	109.721.525

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Table IV.1 menunjukkan penerimaan retribusi dari sewa petak di Pasar 10 Ulu Palembang pada tahun 2010 tercapai. Namun dapat dilihat pada tahun berikutnya, tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 target penerimaan retribusi dari sewa petak tidak tercapai. Seharusnya penerimaan retribusi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi kurang melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal ini disebabkan masih kurangnya pengawasan terhadap penggunaan sewa petak, karena seharusnya sewa petak retribusi yang seharusnya diterima sudah

ditetapkan sesuai dengan kriteria/ukuran tempat yang digunakan oleh pedagang.

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Penerimaan Penghasilan Harian/Kontribusi
Pasar 10 Ulu

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	215.625.000	194.340.000
2	2011	254.275.500	255.034.000
3	2012	371.130.000	358.615.000
4	2013	474.810.000	380.220.000
5	2014	319.250.000	314.215.000

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Tabel IV.2 menunjukkan penerimaan retribusi dari penghasilan harian atau kontribusi pedagang di Pasar 10 Ulu Palembang pada tahun 2010 tidak tercapai. Pada tahun 2011 penerimaan penghasilan harian mengalami peningkatan sehingga target tercapai. Namun pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 target penerimaan penghasilan retribusi tidak tercapai. Rendahnya kesadaran wajib retribusi di pasar 10 Ulu Palembang yaitu dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya, bahkan tidak membayar dengan alasan pendapatannya (penjualannya) rendah, cuaca, serta keadaan dan kondisi pasar membuat petugas dinas pasar 10 Ulu Palembang menjadi kesulitan dalam memungut retribusi pasar.

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan WC
Pasar 10 Ulu

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	7.200.000	5.450.000
2	2011	7.200.000	-
3	2012	7.199.738	-
4	2013	7.179.627	2.319.000
5	2014	5.340.000	4.830.000

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Tabel IV.3 menunjukkan penerimaan retribusi dari fasilitas WC di Pasar 10 Ulu Palembang pada tahun 2010 tidak tercapai. Tahun 2011 dan 2012 tidak ada realisasi, dikarenakan fasilitas WC di pasar 10 Ulu Palembang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan. Pada tahun 2013 terdapat realisasi penerimaan retribusi namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2014 mengalami kenaikan penerimaan retribusi. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya koordinasi kegiatan terhadap fasilitas WC seperti penyediaan air bersih, atau kebersihan fasilitas WC masih sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pada sektor tersebut sehingga penerimaan retribusi menjadi kurang.

Tabel IV.4
Target dan Realisasi Penerimaan Penatausahaan
Pasar 10 Ulu

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	20.469.999	18.985.000
2	2011	24.910.000	23.560.000
3	2012	30.480.000	33.600.000
4	2013	30.480.000	32.880.000
5	2014	8.230.000	7.705.000

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Tabel IV.4 menunjukkan penerimaan retribusi dari penatausahaan di Pasar 10 Ulu Palembang pada tahun 2010 dan 2011 tidak tercapai. Namun, pada tahun 2012 dan 2013 tercapai dikarenakan pengawasan terhadap penatausahaan di Pasar 10 Ulu Palembang. Berjalan dengan cukup baik.

Tabel IV.5
Target dan Realisasi Penerimaan Parkir
Pasar 10 Ulu

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	18.000.000	18.000.000
2	2011	21.480.000	22.410.000
3	2012	23.270.000	23.525.000
4	2013	24.990.000	25.130.000
5	2014	21.825.000	19.515.000

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2015

Tabel IV.5 menunjukkan penerimaan retribusi dari parkir di Pasar 10 Ulu Palembang pada tahun 2010 tercapai. Tahun 2011 sampai tahun 2013 sudah tercapai dengan cukup baik. Namun pada tahun 2014 tidak tercapai, karena kurangnya pengawasan pada pemungutan retribusi parkir sebagian

petugas parkir pasar 10 Ulu Palembang kadang tidak memberikan karcis parkir, sehingga petugas dapat mengurangi setoran parkir kepada petugas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang menyebabkan penerimaan retribusi parker tidak tercapai.

1. Analisis Pengawasan Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)

Berdasarkan tabel IV.1 target dan realisasi penerimaan dari sewa petak, tabel IV.2 penerimaan dari penghasilan harian/kontribusi, tabel IV.3 penerimaan dari WC dari tahun 2010-2014 tidak tercapainya anggaran penerimaan retribusi. Hal ini disebabkan rendahnya pengawasan penerimaan retribusi pasar di Pasar 10 Ulu Kota Palembang tidak rutin menyetorkan pungutan retribusi harian dan bulan kepada PD. Pasar Palembang Jaya. Pengawasan serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah. Petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi kurang melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal ini disebabkan masih kurangnya pengawasan di beberapa sektor penerimaan retribusi. Pada sewa petak retribusi yang seharusnya diterima sudah ditetapkan sesuai dengan criteria/ukuran tempat yang digunakan oleh pedagang, seharusnya penerimaan retribusi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Maka dari itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap

pemungutan retribusi pada pasar 10 Ulu Palembang di beberapa sektor sehingga akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

- b. Menertipkan koordinasi kegiatan-kegiatan. Koordinasi kegiatan-kegiatan sudah dijalankan oleh petugas-petugas yang bersangkutan. Setiap kegiatan pemungutan sudah dikoordinasikan dengan cukup baik. Namun pada penerimaan dari sektor WC masih kurangnya koordinasi kegiatan terhadap fasilitas WC seperti penyediaan air bersih, atau kebersihan fasilitas WC masih sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pada sektor tersebut sehingga mempengaruhi terhadap penerimaan retribusi pasar pada pasar 10 Ulu Palembang.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
Pemborosan dan penyelewengan sudah dicegah dengan pembagian tugas dengan setiap masing-masing fungsi. Disini penyelewengan yang masih mungkin terjadi terdapat pada retribusi parkir. Pada pemungutan retribusi parkir sebagian petugas parkir pasar 10 Ulu Palembang kadang tidak memberikan karcis parkir, sehingga petugas dapat mengurangi setoran parkir kepada petugas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Kebersihan pasar dan pengawasan terhadap barang dari setiap pedagang sudah dijalankan dengan cukup baik.

- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Hal ini dilakukan dengan setiap pembayaran retribusi selalu diberikan karcis, atau bukti pembayaran retribusi atas fasilitas yang digunakan. Sehingga masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar di pasar 10 Ulu Palembang percaya retribusi yang dibayarkan memang biaya yang dipungut sesuai dengan fasilitas yang telah didapatkan.

2. Analisis Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)

Kesadaran wajib retribusi dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku, maka akan mempengaruhi penerimaan retribusi suatu daerah. Kesadaran wajib retribusi serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Masyarakat

Sebagai pemakai fasilitas pasar masyarakat/pedagang mengetahui bahwa setiap penggunaan fasilitas pasar harus mengeluarkan biaya atas fasilitas yang telah mereka gunakan di pasar 10 Ulu Palembang.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pedagang di pasar 10 Ulu Palembang yaitu tingkat SD, SMP dan SMA. Berdasarkan wawancara dengan pedagang di pasar Ulu 10 Palembang tingkat pendidikan pedagang di pasar 10 Ulu

Palembang tidak terlalu mempengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk membayar retribusi maupun dalam pembayaran jumlah retribusi, dikarenakan mereka mengetahui besar retribusi yang harus dikeluarkan berdasarkan pengalaman selama mereka berdagang.

c. Sistem yang Berlaku

Periode penarikan retribusi ada yang dilakukan setiap hari, mingguan maupun bulanan sesuai dengan fasilitas yang digunakan oleh pemakai. Sistem yang berlaku di pasar 10 Ulu Palembang yaitu petugas pemungut retribusi memberikan karcis atau bukti penarikan retribusi yang berisikan tarif retribusi yang wajib dibayarkan pemakai fasilitas pasar.

Rendahnya kesadaran wajib retribusi di pasar 10 Ulu Palembang yaitu dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya, bahkan tidak membayar dengan alasan pendapatannya (penjualannya) rendah, cuaca, serta keadaan dan kondisi pasar membuat petugas dinas pasar 10 Ulu Palembang menjadi kesulitan dalam memungut retribusi pasar. Sedangkan hasil wawancara dengan pedagang dapat disimpulkan bahwa mereka telah membayar pungutan retribusi pasar setiap hari bagi pedagang kaki lima dan bulanan bagi pedagang toko. Bahkan meskipun cuaca hujan, sepi pembeli, dan terkadang barang-barang mereka banyak yang hilang meskipun telah membayar uang keamanan tapi mereka tetap rutin membayar kewajiban mereka sebagai pemakai fasilitas pasar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya anggaran penerimaan retribusi disebabkan rendahnya pengawasan penerimaan retribusi pasar di Pasar 10 Ulu Kota Palembang tidak rutin menyetorkan pungutan retribusi harian dan bulan kepada PD. Pasar Palembang Jaya. Petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi kurang melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal ini disebabkan masih kurangnya pengawasan di beberapa sektor penerimaan retribusi. Setiap kegiatan pemungutan sudah dikoordinasikan dengan cukup baik. Namun pada penerimaan dari sektor WC masih kurangnya koordinasi kegiatan terhadap fasilitas WC seperti penyediaan air bersih, atau kebersihan fasilitas WC masih sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pada sektor tersebut sehingga mempengaruhi terhadap penerimaan retribusi pasar. Pemborosan dan penyelewengan sudah dicegah dengan pembagian tugas dengan setiap masing-masing fungsi. Disini penyelewengan yang masih mungkin terjadi terdapat pada retribusi parkir. Kebersihan pasar dan pengawasan terhadap barang dari setiap pedagang sudah dijalankan dengan cukup baik. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi pada pasar 10 Ulu Palembang di beberapa sektor sehingga akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
2. Pada ditingkatkan pengawasan terhadap penerimaan dari sektor WC agar meningkatkan koordinasi kegiatan terhadap fasilitas WC seperti penyediaan air bersih, atau kebersihan fasilitas WC sehingga tidak mengalami keterlambatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Ardana Indra P (2013), *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Iqbal Hasan. 2009. *Pokok-pokok Materi Statistik I*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Kesit Bambang Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI .
- Marihot, Pahala Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Ristina, Dewantinieung dan Azhari A Samudera. 2012. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah Aceh*. Jurnal. Program Studi Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Sugiyono. 2009. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Tilawatil Ciseta (2014), *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang*. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/11/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website : umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

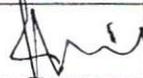
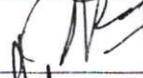
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Januari 2016
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Muhamad Andri
NIM : 22 2011 127
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN DAN KESADARAN WAJIB
RETRIBUSI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR (STUDI KASUS PADA PASAR 10 ULU KOTA
PALEMBANG)

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	13/1/2016	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	15/1/2016	
3	Ida Zuraidah, Hj., S.E, Ak., M.Si	Penguji I	14/01/2016	
4	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji II	13/1/2016	

Palembang, Januari 2016

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, S.E, Ak.M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960

Jadwal Penelitian

Keterangan	Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Jan			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei																								
Pendahuluan																								
Proposal UP																								
Konsultasi Proposal UP																								
Seminar UP																								
Perbaikan UP																								
Pengambilan Data																								
Pengolahan Data																								
Analisis Data																								
Penggandaan Skripsi																								
Ujian Komprehensif																								

Sumber: *Penulis*, 2015



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA**



alamat : Jl. KHA. Dahlan No. 64 A Lt. II Pasar Bk. Kecil Fax 0711-352249 Telp 0711-320092 Website: www.pasarpalembangjaya.co.id

Palembang, 21 April 2015

Kepada

Yth. Dekan U.b Kepala Tata Usaha
Universitas Muhammadiyah
Palembang Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis.
di -

Nomor : 070/271 /PD.Psr/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

PALEMBANG

Berdasarkan surat dari Dekan U.b Kepala Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nomor : 587/ H-5 / FEB-UMP/ IV /2015 tanggal 17 April 2015, hal izin pengambilan data atas:

Nama : Muhammad Andri
Nim : 22 2011127
Program Studi : Akuntansi

Pada prinsipnya kami setuju mahasiswa tersebut melakukan pengambilan data di Pasar 10 Ulu Palembang.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya.


H. ACHMAD BASTARI, SE., MM

- Tembusan Yth :
1. Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Palembang Jaya
 2. Kepala SPI PD. Pasar Palembang Jaya
 3. Arsip



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Muhamad Andri	PEMBIMBING
NIM : 22 2011 127	KETUA Aprianto, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGAWASAN DAN KESADARAN WAJIB RETRIBUSI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR (Studi Kasus Pada Pasar 10 Ulu Kota Palembang)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	26/1/2015	Bab I - II	f		perbaiki
2					
3	27/1/2015	Bab I - II	f		perbaiki
4					
5	28/1/2015	Bab 1 - II	f		perbaiki
6					(perbaiki dan saran)
7					
8	27/10/14	Bab 1 - II	f		ACE.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal :
 a.n. Dekan
 Program Studi

Rosalina Ghazali, S.T, Ak, M.Si

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MUHAMMAD ANDRI
NIM : 222011127
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 01/2015/ديسمبر

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Muhamad Andri
Place/Date of Birth : Palembang, May 21st 1993
Test Times Taken : +1
Test Date : July 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	40
Structure Grammar	:	39
Reading Comprehension	:	45
OVERALL SCORE	:	413

Palembang, July 26th, 2015

Head of Language Institute


LEMBAGA BAHASA
Universitas Muhammadiyah Palembang
Rini Susanti, S.Pd., M.A

NBM/NIDN 1164932/0210098407

No. 105/TEA/EE/19/UMPA/11/2015

12/07/2015



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIA Q A M

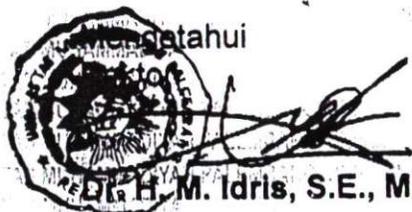
No.509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Andri
Nomor Pokok Mahasiswa : 222011127
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 21-05-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : SP. Padang
Kecamatan : SP. Padang
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui

H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 Maret 2015

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

- Nama : Muhamad Andri
- Tempat tanggal lahir : Palembang, 21 Mei 1993
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Jln. Kelapa gading raya perumahan talang kelapa
Lantanah 19 RT 91/RW 17 kelurahan talang kelapa
kecamatan alang-alang lebar
- Telepon : 082322221917
- Nama Orang Tua
1. Ayah : Ir. Kifrawi
 2. Ibu : Karla Susanti
- Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Swasta
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
- Alamat Orang Tua
1. Ayah : Jln. Kelapa gading raya perumahan talang kelapa
Lantanah 19 RT 91/RW 17 kelurahan talang kelapa kecamatan alang-
alang lebar.
 2. Ibu : -